



**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN 2022**



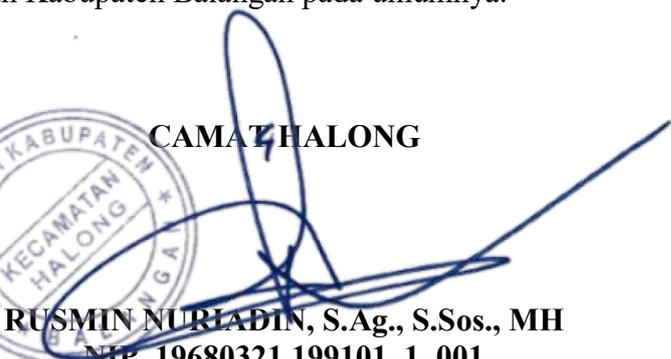
**KECAMATAN HALONG  
KABUPATEN BALANGAN**

# KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kecamatan Halong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban formal atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Halong dan telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Kecamatan Halong pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan pada umumnya.

  
**CAMAT HALONG**  
  
**RUSMIN NURLADIN, S.Ag., S.Sos., MH**  
**NIP. 19680321 199101 1 001**

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Halong Tahun 2022 ini disusun untuk menyajikan laporan capaian indikator kinerja dan evaluasi atas tujuan dan sasaran yang merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Halong selama Tahun 2022. Adapun penganggaran kegiatan tersusun dalam 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan. Berikut adalah rekapitulasi dari capaian indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Halong dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang didapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat dengan menyebarkan kuisisioner kepada masyarakat yang dilakukan oleh Kasi Pelayanan Publik kepada **25** Responden per semester penilaian. Nilai perolehan sebesar 86,24 adalah nilai perolehan IKM Tahun 2022 (Nilai Rata-Rata IKM Semester I dan II) dengan rasio capaian indikator kinerja adalah 105,17 %.

Indikator	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Indeks Kepuasan Masyarakat ((IKM)</i>	105,94%	82 (baik)	86,24	<b>105,17%</b>	100,28 %
Rata – Rata Capaian				<b>105,17%</b>	100,28 %

2. Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan dengan indikator penilaian rata-rata Skor Indeks Desa Membangun Lingkup Kecamatan Halong yang dilakukan penilaian setiap tahun (biasanya nilai rilis pada Bulan Agustus). Indikator ini pertama kali ditetapkan sebagai indikator penilaian keberhasilan kinerja kecamatan sejak Tahun 2021 sehingga tidak pernah terencanakan pencapaiannya pada tahun-tahun sebelumnya. Capaian Skor IDM Tahun 2022 adalah sebagaimana pada tabel di bawah ini.

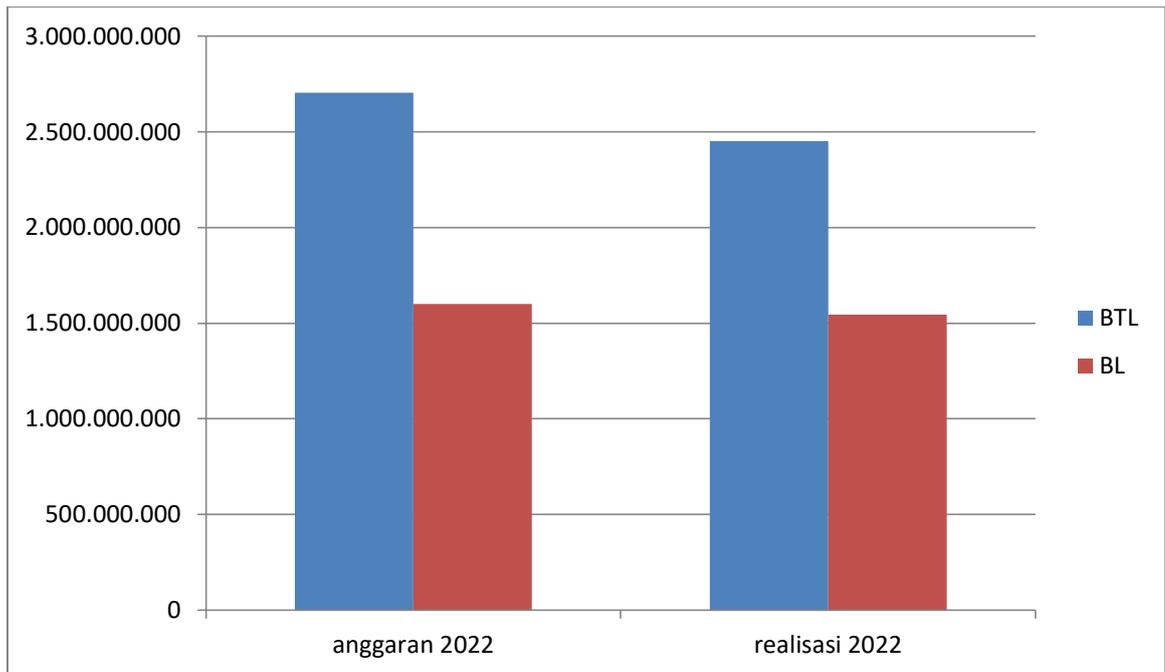
Indikator	2021	2022			Capaian 2022 thdp 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
<i>Skor IDM Desa Lingkup Kecamatan Halong</i>	100%	0,6843	0,7378	<b>107,82%</b>	96,53 %
Rata – Rata Capaian				<b>107,82%</b>	96,53 %

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 109,86 %;
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 100 %;
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 100%;
- 4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 100%;
- 5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 100%
- 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 100%

Alokasi anggaran Kecamatan Halong pada Tahun 2022 berjumlah Rp. 4.303.378.603,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung berjumlah Rp. 2.703.651.803,00 dan Belanja Langsung Berjumlah Rp. 1.599.726.800,00. Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.995.485.760,00 atau sekitar 92,85% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.449.866.100,00 (90,61%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.545.619.660,00 (96,62%). Seluruh pagu anggaran terbagi menjadi 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan.

Berikut adalah diagram perbandingan pagu anggaran setelah perubahan dengan realisasi anggaran Tahun 2022 pada Kecamatan Halong.



Adapun capaian target kinerja program pada lokasi anggaran Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

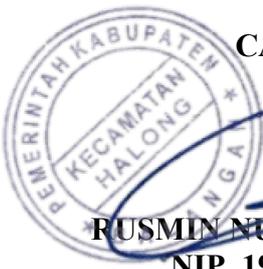
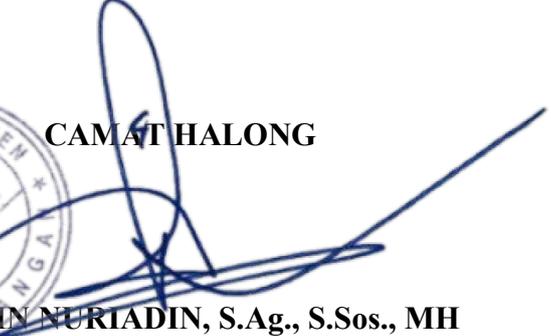
No.	Indikator Kinerja Program	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Kategori Capaian
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	Sekretariat	109,86	Sangat Berhasil
2	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	Kasi Pelayanan Publik	100	Sangat Berhasil
3	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	Sangat Berhasil
4	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Sangat Berhasil

5	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100	Sangat Berhasil
6	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	Sangat Berhasil
<b>Rata-rata Capaian</b>			101,64	<b>Sangat Berhasil</b>

Diharapkan dengan disusunnya Laporan Kinerja Kecamatan Halong Tahun 2022 ini maka dapat digunakan sebagai :

- a. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- b. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Dengan kerja keras dan kerja cerdas serta dukungan dari semua pihak, semoga Kecamatan Halong dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi dan dapat melaksanakan program-program secara lebih baik dan akuntabel.


**CAMAT HALONG**  
  
**RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH**  
**NIP. 19680321 199101 1 001**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	2
1.4 Gambaran Umum SKPD .....	3
1.4 Sistematika Penulisan .....	8
BAB II   PERENCANAAN KINERJA .....	9
2.1 Perencanaan Kinerja.....	9
2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA) .....	9
2.1.2 Rencana Kerja (RENJA).....	10
2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	14
2.1.4 Perjanjian Kinerja (PK) .....	16
BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
3.1 Akuntabilitas Kinerja .....	17
3.1.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	17
3.1.2 Realisasi Anggaran .....	20

3.1.3 Analisis Kinerja Lainnya .....	23
BAB IV PENUTUP .....	24
4.1 Capaian Indikator Tujuan SKPD.....	24
4.2 Rangkuman Singkat Capaian Perjanjian Kinerja .....	24
4.3 Upaya Perbaiki .....	26

# DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan ..... dan Pangkat/Golongan	6
Tabel 1.2 Daftar Nominatif PNS Kecamatan Halong .....	7
Tabel 2.1 Tabel 2.1 Data Tujuan, Sasaran dan Target Indikator ..... Sasaran Renstra 2021-2016	10
Tabel 2.2 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perubahan 2022	10
Tabel 2.2 Data Indikator Kinerja Utama Kecamatan Halong .....	15
Tabel 2.3 Data Perjanjian Kinerja Camat 2022 .....	16
Tabel 3.1 Daftar Kategori Capaian Kinerja SKPD .....	17
Tabel 3.2 Daftar Capaian Kinerja Utama Kecamatan Halong .....	18
Tabel 3.3 Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 .....	20
Tabel 3.4 Data Analisis Efisiensi Anggaran dan Kinerja TA 2022 .....	23
Tabel 4.1 Daftar Rincian Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022 ...	24

# DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.1 Peta Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan .....	3
Gambar 1.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Halong .....	5

Per 31 Desember 2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Kecamatan Halong Berdasarkan Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan, kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Karena tugas yang diemban oleh Kecamatan Halong cukup berat, maka agar dapat berhasil diperlukan adanya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Halong sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Halong, maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) berupa Perencanaan Kinerja yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan dalam Tahun 2022.

Renja yang sudah dilaksanakan selama Tahun 2022, kemudian pada setiap akhir tahun disempurnakan dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam sebuah LKIP dapat dilihat aktivitas pengambilan keputusan tentang tingkat pencapaian kinerja yang diinginkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah termuat dalam DPA, sehingga dijadikan sebagai tolak ukur dalam komitmen bagi Kecamatan Halong untuk pencapaian dalam Tahun 2022. Evaluasi atas LKIP berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolak ukur keberhasilan Kecamatan Halong dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan dengan hal tersebut maka dalam rangka menyongsong era globalisasi serta perubahan kondisi dan situasi yang berkembang pesat Kecamatan Halong harus terus menerus mengalami perubahan ke arah perbaikan. Rencana Strategis Kecamatan Halong yang telah disusun merupakan langkah awal dalam menjawab tuntutan pelayanan kecamatan dengan serangkaian rencana program kegiatan mendasar yang harus dapat diimplementasikan guna mencapai tujuan.

Melalui Rencana Strategis juga diharapkan segala kebutuhan masyarakat terkait layanan kecamatan dapat terakomodasi secara transparan, demokratis dan akuntabel. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Rencana Strategis yang dijabarkan dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Halong secara nyata dalam upaya pemberian pelayanan kepada

masyarakat umum, disusunlah Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggungjawab dan Pengelolaan Keuangan Negara
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
8. Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Balangan Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan

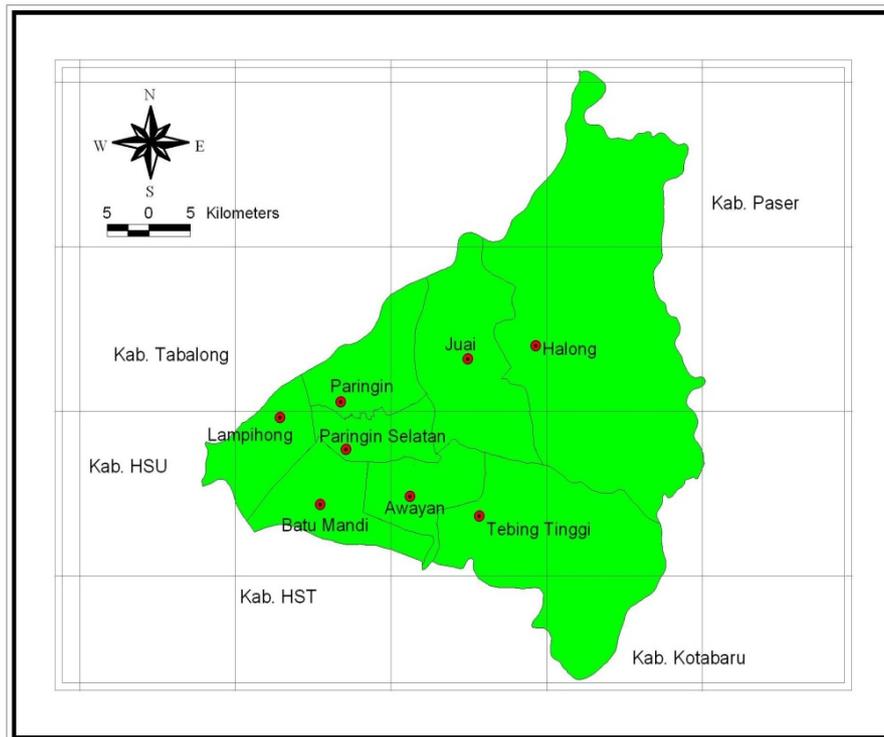
## **1.3. TUJUAN**

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di Tahun 2022. Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Tahun 2022 adalah sebagai :

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Halong dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2022 kepada seluruh stakeholders.
2. Laporan kinerja merupakan bahan penilaian dan sarana evaluasi keberhasilan atas pencapaian kinerja Kecamatan Halong sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

#### 1.4. GAMBARAN UMUM SKPD

Kecamatan Halong Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 Tanggal 11 November 1980, hasil pemekaran dari Kecamatan Juai. Kecamatan Halong secara keseluruhan memiliki luas kurang lebih 659,86 KM<sup>2</sup>, yang terbagi dalam 24 Desa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 20.557 jiwa. Terdiri dari Laki-laki 10.474 jiwa dan Perempuan 10.083 jiwa. Dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Tabalong dan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Utara, Kecamatan Awayan di sebelah Selatan, Kabupaten Kotabaru di sebelah Timur dan Kecamatan Juai di sebelah Barat.



Gambar 1.3 Peta Kecamatan Halong di Kabupaten Balangan

Dalam Peraturan Bupati Balangan nomor 72 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Balangan disebutkan bahwa tugas pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Sedangkan fungsi yang diselenggarakan kecamatan untuk mencapai pelaksanaan tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan
4. Pelaksanaan administrasi kecamatan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

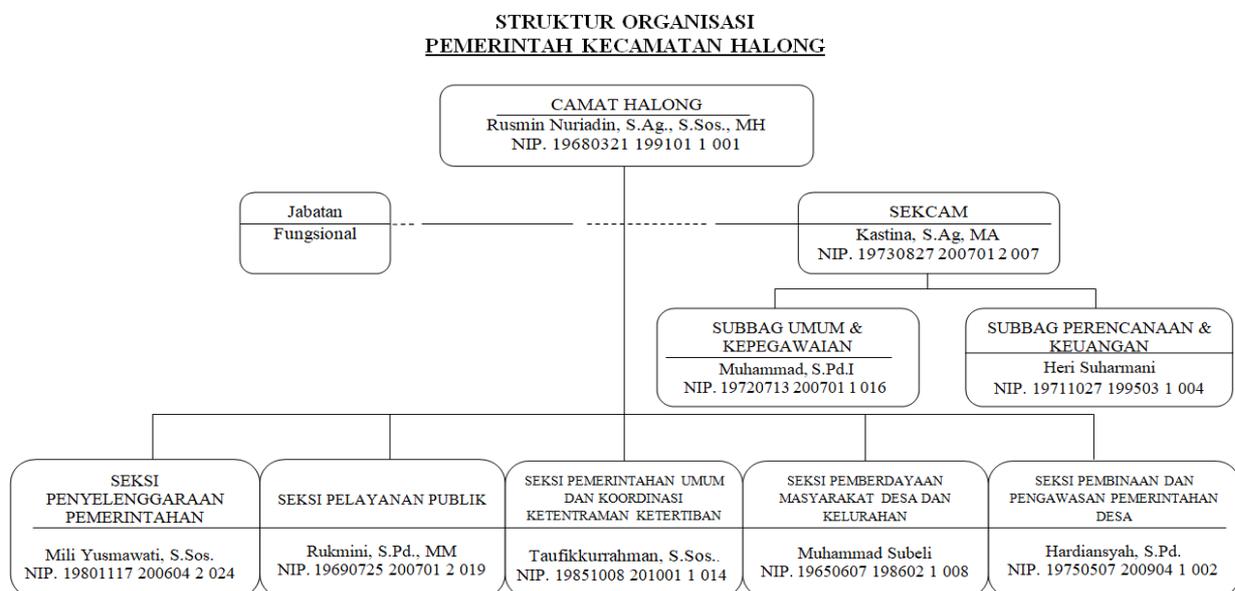
Berikut uraian tugas dari kecamatan di kabupaten balangan :

1. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
2. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan.
3. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pelayanan publik.
4. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban.
5. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
6. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
7. Mengkoordinasikan dan menyingkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
8. Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemerintahan umum dan koordinasi ketentraman ketertiban, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
9. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan.
10. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Dalam pelaksanaan tugas yang diemban kecamatan di Kabupaten Balangan, Camat sebagai kepala/pimpinan SKPD di kecamatan memiliki stakeholder sebagaimana susunan organisasi sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
  - b. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan
4. Seksi Pelayanan Publik
5. Seksi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
7. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8. Kelurahan
9. Kelompok jabatan fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan per 31 Desember 2021 nampak pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.4 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Halong Per 31 Desember 2022

Adapun jumlah pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan pejabat struktural dan fungsional dari Kecamatan Halong dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pegawai menurut Kualifikasi Pendidikan dan Pangkat/Golongan

SKPD	JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	PANGKAT	JLH (ORG)	GOLONGAN	JLH (ORG)
KECAMATAN AN HALONG	22	SD	-	I/a	-	I	2
		SLTP	3	I/b	-	II	8
		SLTA	9	I/c	-	III	10
		D1	-	I/d	2	IV	2
		D2	-	II/a	-		
		D3	-	II/b	3		
		D4	-	II/c	2		
		S1	7	II/d	3		
		S2	3	III/a	2		
		S3	-	III/b	3		
				III/c	-		
				III/d	5		
				IV/a	1		
				IV/b	1		
				IV/c	-		
				IV/d	-		
		IV/e	-				

Sedangkan nama Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Halong Kabupaten Balangan baik pejabat struktural maupun fungsional umum dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.2 Daftar Nominatif PNS Kecamatan Halong

<b>NO</b>	<b>NAMA DAN NIP</b>	<b>PANGKAT / GOLONGAN</b>	<b>JABATAN</b>
01	Rusmin Nuriadin, S.Ag., S.Sos., MH 19680321 199101 1 001	Pembina Tk.I (IV/b)	Camat
02	Rukmini, S.Pd., MM 19690725 200701 2 019	Pembina (IV/a)	Kasi Pelayanan Publik
03	Muhammad Subeli 19650607 198602 1 008	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
04	Kastina, S.Ag., MA 19730827 200701 2 007	Penata Tk.I (III/d)	Sekretaris Kecamatan
05	Taufikkurrahman, S.Sos. 19851008 201001 1 014	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban
06	Heri Suharmani 19711027 199503 1 004	Penata TK.I (III/d)	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
07	Hardiansyah , S.Pd. 19750507 200904 1 002	Penata Tk.I (III/d)	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
08	Muhammad, S.Pd.I 19720713 200701 1 015	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
09	Mili Yusmawati, S.Sos. 19801117 200604 2 024	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
10	Siti Aisyah, S.Sos. 19750719 200604 2 023	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
11	Novia Mutiasi, S.IP 19921102 202012 2 017	Penata Muda (III/a)	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah
12	Susiani, S.AP 19840404 200604 2 015	Penata Muda (III/a)	Analisis Kemasyarakatan
13	Asitam 19680608 200701 1 031	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Kepegawaian
14	Misdi 19670920 200701 1 027	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Perizinan
15	Samsul Arifin 19860705 200906 1 002	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Pemerintahan
16	Ismi 19710209 201406 1 001	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum

17	Siti Jubaidah 19740620 201406 2 005	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Keuangan
18	Ardahani 19710609 200701 1 026	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengemudi
19	Munis 19790118 200701 1 009	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Petugas Penggandaan
20	Husin 19730704 200701 1 025	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Petugas Keamanan
21	Abdul Hamid 19740512 201212 1 001	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Bakti
22	Rupinsi 19730809 200701 1 019	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan

### 1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Laporan LAKIP adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, landasan hukum pembentukan, maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja, gambaran umum singkat SKPD sesuai SOTK baru serta sistematika laporan.
- Bab II : Perencanaan kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Bab III : Akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil Tahun 2022
- Bab IV : Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Kinerja dan Strategi Peningkatan Kecamatan Halong Kabupaten Balangan

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka Kecamatan Halong mendukung pelaksanaan misi nomor empat yaitu Meningkatkan Kualitas dan Layanan Birokrasi Pemerintahan sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan di lingkungan wilayah Kecamatan Halong melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Peningkatan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan.

#### 2.1.1 Rencana Strategis (RENSTRA)

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Halong sebagaimana yang tercantum dalam Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka ditentukan sasaran dari tujuan SKPD Kecamatan Halong adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan

Adapun data tujuan, sasaran dan target indikator sasaran Kecamatan Halong Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Data Tujuan, Sasaran dan Target Indikator Sasaran Renstra 2021-2016

Tujuan	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82	83	84	85	86
Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6643	0,6643	0,7043	0,7243	0,7443	0,7643

### 2.1.2 Rencana Kerja (RENJA)

Rencana kerja Tahun 2022 Kecamatan Halong terdiri dari 4 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renja Perubahan 2022

No	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan Sesudah Perubahan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub	Target	
			Kinerja	Anggaran
1.	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong</b>	<b>65.2</b>	<b>3.577.544.803</b>
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disampaikan Tepat Waktu	100%	45.216.000
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disampaikan dengan Baik	100%	4.006.000
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Dokumen RKA dan DPA yang disampaikan dengan Baik	100%	2.335.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah disampaikan dengan Baik	100%	38.875.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang Berlaku	12 Bulan	2.808.291.803
4.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	2.703.651.803
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	100%	104.640.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan	40.880.000
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 OP	40.880.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	12 Bulan	190.042.000
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	7.987.000
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	87 Kali	182.055.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	300.000.000

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	1 Unit	270.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	4 Buah	30.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	111.891.000
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Terbayarnya Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	24.200.000
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	87.691.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	81.224.000
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	63.624.000
12.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi	100%	17.600.000
<b>2.</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan</b>	<b>100%</b>	<b>134.818.000</b>
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	134.818.000
13.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	134.818.000
<b>3.</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Fasilitas Pelaksanaan Musrenbang Desa</b>	<b>100%</b>	<b>328.200.000</b>
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	328.200.000
14.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Waktu Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	12 Bulan	328.200.000
<b>4.</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor</b>	<b>100%</b>	<b>9.014.000</b>

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	9.014.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketenteraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	9.014.000
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa</b>	<b>100%</b>	<b>158.137.000</b>
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	158.137.000
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	5 Keg	158.137.000
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa</b>	<b>100%</b>	<b>95.664.800</b>
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	95.664.800
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa dengan Administarsi Pencatatan Pengelolaan Keuangan Desa Lengkap	100%	88.100.000
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa yang Menyampaikan Usulan Musyawarah Pembangunan Desa Tepat Waktu	100%	7.564.800
<b>Jumlah Anggaran dari seluruh Program</b>			<b>4.303.378.603</b>

### **2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Halong 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 2.3 di halaman selanjutnya.

Tabel 2.6 Data Indikator Kinerja Utama Kecamatan Halong

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN			PROGRAM / KEGIATAN
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kategori	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat	Hasil survey	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2	Meningkatnya kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	Kategori	Dalam rangka mewujudkan Visi Bupati Balangan Tahun 2021-2026 yaitu Membangun Desa dengan cara Peningkatan Indeks Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan	Skor Rata-Rata IDM Desa	Hasil Skor IDM Desa di Kecamatan Halong	Program Pembinaan dan Pegawai Pemerintah an Desa

#### 2.1.4 Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022 maka Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Perjanjian Kinerja Camat (Eselon IIIa). sebagaimana tampak pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Data Perjanjian Kinerja Camat 2022

NO	KINERJA UTAMA (SASARAN STRATEGIS)	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	82
2	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6643

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 AKUNTABILITAS KINERJA

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Dalam mengukur efisiensi penggunaan sumberdaya ada beberapa hal yang diukur yaitu:

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Kecamatan Halong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Daftar Kategori Capaian Kinerja SKPD

URUTAN	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
I	$\geq 100 \%$	Sangat Berhasil
II	$\geq 90 \% < 100 \%$	Berhasil
III	$\geq 80 \% < 90 \%$	Cukup Berhasil
IV	$< 80 \%$	Kurang Berhasil

#### 3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah Data Capaian Kinerja Utama Kecamatan Halong Tahun 2022.

Tabel 3.2 Daftar Capaian Kinerja Utama Kecamatan Halong

No.	Sasaran	Indikator	Realisasi 2021	2022			Kategori Capaian	Akhir Renstra		Kategori Capaian
				Target	Realisasi	Capaian		Target	Capaian	
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,76	82	86,24	105,17%	Sangat Berhasil	86	100,28%	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6643	0,6843	0,7378	107,82%	Sangat Berhasil	0,7643	96,53%	Berhasil

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) Indikator Sasaran Kinerja Utama Kecamatan Halong berdasarkan Perencanaan Kinerja Baru (2021-2026) yaitu Nilai IKM dan Skor IDM Desa, berikut penjelasannya :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada Tabel 3.2 dinyatakan bahwa Realisasi Nilai IKM Tahun 2021 adalah sebesar 84,76 sedangkan target yang ingin dicapai di Tahun 2022 berdasarkan Target Indikator yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebesar 82. Dikarenakan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap PATEN dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali atau per semester, maka data realisasi IKM yang tersedia per tanggal 31 Desember 2022 adalah data Rata-Rata Nilai IKM Tahun 2022 (Nilai Semester I ditambah Nilai IKM Semester II kemudian dibagi 2) yaitu sebesar **86,24**. Jika dilakukan perhitungan perbandingan/rasio capaian antara realisasi 2022 dengan target 2022 maka didapat nilai sebesar **105,17 %** atau masuk dalam kategori **Sangat Berhasil**. Sedangkan Capaian terhadap Target Akhir Renstra adalah sebesar 100,28%, dengan Target Nilai IKM sebesar 86. Pencapaian ini didukung secara langsung oleh ketersediaan pendanaan anggaran Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan sebesar Rp. 134.818.000,00.

Meskipun rasio antara realisasi dan target termasuk dalam kategori sangat berhasil, namun ada beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan untuk mendapatkan pencapaian yang lebih maksimal lagi, yaitu antara lain :

a. Peningkatan Kualitas SDM Bidang Pelayanan

Diharapkan nantinya minimal Tingkat Kepuasan Masyarakat terkait Bidang Pelayanan berada pada Nilai IKM sekarang, walaupun nantinya ada penyesuaian terhadap Target Nilai IKM.

b. Sosialisasi tentang Prosedur dan Persyaratan berbagai Jenis Layanan PATEN

Diharapkan masyarakat akan semakin memahami dan mengetahui prosedur dan persyaratan berbagai Jenis Layanan PATEN yang ada di Kecamatan Halong. Sehingga nantinya tidak ada lagi penerima layanan yang dikecewakan sehubungan dengan ketidaktahuan dengan prosedur dan persyaratan.

c. Penambahan Sarana dan Prasarana pada Bidang Pelayanan

Keberadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pelayanan diharapkan akan berbanding lurus dengan Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap berbagai Jenis Layanan yang diberikan.

2. Skor IDM Desa

Pada Tabel 3.2 dinyatakan bahwa Realisasi Skor IDM Desa pada Tahun 2021 adalah sebesar 0,6643 atau dengan capaian 100% dari Target Nilai IDM sebesar 0,6643. Sedangkan target yang ingin dicapai di Tahun 2022 berdasarkan Target Indikator yang tercantum dalam Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebesar 0,6843. Adapun Realisasi Skor IDM Tahun 2022 adalah sebesar 0,7378 atau dengan capaian sebesar 107,82%. Sedangkan Capaian terhadap Target Akhir Renstra adalah sebesar 96,53%, dengan Target Skor IDM sebesar 0,7643. Pencapaian ini didukung secara langsung oleh ketersediaan Pendanaan Anggaran Tahun 2022 Sub Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa sebesar Rp. 88.100.000,00.

Keberadaan Skor IDM yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kecamatan Halong, sebenarnya menjadi polemik tersendiri, hal ini dikarenakan peran Pemerintah Kecamatan Halong dalam merubah Skor IDM sangat kecil sekali. Sebagaimana diketahui bahwa Skor IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan 3 (tiga) indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, yang menggambarkan

Perkembangan Desa. Perubahan ketiga indeks dimaksud sangat dipengaruhi oleh keterlibatan banyak pihak.

### **3.1.2. Realisasi Anggaran**

Alokasi Anggaran Kecamatan Halong Kabupaten Balangan pada Tahun 2022 berjumlah Rp. 4.303.378.603,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung berjumlah 2.703.651.803,00 dan Belanja Langsung Berjumlah Rp. 1.599.726.800,00. Sedangkan Anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 3.995.485.760,00 atau sekitar 92,85% yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.449.866.100,00 (90,61%) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 1.545.619.660,00 (96,62%).

Berikut adalah data perbandingan antara pagu anggaran dan realisasi masing-masing Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun anggaran 2022 pada Kecamatan Halong per 31 Desember 2022 :

Tabel 3.3 Rincian Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.577.544.803</b>	<b>3.279.415.160</b>	<b>91,67%</b>
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>45.216.000</b>	<b>44.852.000</b>	<b>99,19%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.006.000	3.956.000	98,75%
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.335.000	2.221.000	95,12%
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	38.875.000	38.675.000	99,49%
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.808.291.803</b>	<b>2.542.911.488</b>	<b>90,55%</b>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.703.651.803	2.449.866.100	90,61%
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	104.640.000	93.045.388	88,92%
<b>3</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>40.880.000</b>	<b>36.842.000</b>	<b>90,12%</b>
6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40.880.000	36.842.000	90,12%
<b>4</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>190.042.000</b>	<b>187.419.356</b>	<b>98,62%</b>
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.987.000	5.730.800	71,75%
8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.055.000	181.688.556	99,80%
<b>5</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>300.000.000</b>	<b>290.855.000</b>	<b>96,95%</b>
9.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	270.000.000	267.900.000	99,22%
10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	22.955.000	76,52%
<b>6</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>111.891.000</b>	<b>103.331.699</b>	<b>92,35%</b>
11.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.200.000	17.930.699	74,09%
12.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	87.691.000	85.401.000	97,39%
<b>7</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>81.224.000</b>	<b>73.203.617</b>	<b>90,13%</b>
13.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.624.000	55.603.617	87,39%
14.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	17.600.000	17.600.000	100,00%

<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>134.818.000</b>	<b>134.795.000</b>	<b>99,98%</b>
<b>8</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>134.818.000</b>	<b>134.795.000</b>	<b>99,98%</b>
15.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	134.818.000	134.795.000	99,98%
<b>III</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>328.200.000</b>	<b>327.925.000</b>	<b>99,92%</b>
<b>9</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>328.200.000</b>	<b>327.925.000</b>	<b>99,92%</b>
16.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	328.200.000	327.925.000	99,92%
<b>IV</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>9.014.000</b>	<b>8.684.000</b>	<b>96,34%</b>
<b>10</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>9.014.000</b>	<b>8.684.000</b>	<b>96,34%</b>
17.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	9.014.000	8.684.000	96,34%
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>158.137.000</b>	<b>149.110.000</b>	<b>94,29%</b>
<b>11</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>158.137.000</b>	<b>149.110.000</b>	<b>94,29%</b>
18.	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	158.137.000	149.110.000	94,29%
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>95.664.800</b>	<b>95.556.600</b>	<b>99,89%</b>
<b>12</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>95.664.800</b>	<b>95.556.600</b>	<b>99,89%</b>
19.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	88.100.000	88.020.000	99,91%
20.	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	7.564.800	7.536.600	99,63%
<b>TOTAL</b>		<b>4.303.378.603</b>	<b>3.995.485.760</b>	<b>92,85%</b>

### 3.1.3. Analisis Kinerja Lainnya

Dalam analisis kinerja lainnya atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel Analisis Efisiensi Capaian Anggaran dan Kinerja atas Sasaran dan Indikator Sasaran Kecamatan Halong Tahun 2022 berikut ini.

Tabel 3.4 Data Analisis Efisiensi Anggaran dan Kinerja TA 2022

Sasaran / Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik</b>								
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Nilai IKM	82	86,24	105,17%	134.818.000	134.795.000	99,98%	Relevan dan Efektif
<b>Sasaran 2 : Meningkatkan Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan</b>								
Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Skor IDM Desa	0,6843	0,7378	107,82%	88.100.000	88.020.000	99,91%	Relevan dan Efektif

# BAB IV

## PENUTUP

### 4.1. CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN SKPD

Telah dilaksanakan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Halong Tahun 2022 dengan capaian atas Indikator Tujuan yaitu :

#### 1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Indikator berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 84,26 dari Target Tahun 2022 sebesar 82, sehingga terhitung Rasio Realisasi terhadap Target 2022 sebesar 105,17% dengan kategori Sangat Berhasil.

#### 2. Meningkatnya kemandirian Desa Lingkup Kecamatan

Indikator berupa Skor IDM Desa sebesar 0,7378 dari Target Tahun 2022 sebesar 0,6843, sehingga terhitung Rasio Realisasi terhadap Target 2022 sebesar 107,82% dengan kategori Sangat Berhasil.

### 4.2. RANGKUMAN SINGKAT CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam Pelaksanaan Tugas Fungsi Kecamatan Halong, seluruh Kasi dan Kasubbag di Kecamatan Halong berkomitmen untuk mencapai target perjanjian kinerja masing-masing per 31 Desember 2022. Adapun rincian dari Capaian Perjanjian Kinerja dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.2 Daftar Rincian Capaian Indikator Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai IKM	82	86,24	Camat
	Meningkatnya Kemandirian Desa Lingkup Kecamatan	Skor IDM Desa	0,6843	0,7378	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Pelayanan Administrasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong	65,2	71,63 (BB)	Sekretaris Kecamatan

	Keuangan				
3.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang Disampaikan dengan Baik	100%	100%	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
		Persentase Dokumen RKA dan DPA yang Disampaikan dengan Baik	100%	100%	
		Persentase Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Telah Disampaikan dengan Baik	100%	100%	
		Persentase ASN yang Terbayarkan Gaji dan Tunjangan sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	100%	100%	
		Persentase Dokumen Keuangan yang Diverifikasi	100%	100%	
4.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6 Orang	5 Orang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	
		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang Diselenggarakan	87 Kali	87 Kali	
		Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Diadakan	1 Unit	1 Unit	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	4 Buah	4 Buan	
		Persentase Terbayarnya	100%	100%	

		Tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
		Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	12 Bulan	
		Persentase Kendaraan Dinas Operasional Layak Fungsi	100%	100%	
		Persentase Sarana dan Prasarana Gedung Layak Fungsi	100%	100%	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	100%	Kasi Penyelenggaraan Pemerintahan
6.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan	100%	100%	Kasi Pelayanan Publik
7.	Meningkatnya Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Pemerintahan Umum dan Trantib	Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor	100%	100%	Kasi Pemerintahan Umum dan Koordinasi Ketentraman Ketertiban
8.	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Musrenbang Desa	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa	100%	100%	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
9.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	100%	Kasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

#### 4.3. UPAYA PERBAIKAN

Berapa langkah yang dapat ditempuh Pemerintah Kecamatan Halong untuk meningkatkan kinerja Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Mempertahankan kinerja yang sudah dicapai yaitu kinerja dengan capaian “sangat berhasil”.

2. Mengevaluasi kembali segala kekurangan-kekurangan yang masih dimungkinkan ada.
3. Mengatasi segala kendala-kendala/hambatan yang ada dalam pencapaian kinerja.
4. Menyempurnakan, mengembangkan dan meningkatkan kualitas program, dengan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah termuat dalam Renstra Kecamatan Halong yang berkualitas disesuaikan dengan kebutuhan akan peningkatan kompetensi dan pelayanan.
5. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Halong.
6. Secara konsisten dan berkelanjutan melakukan perbaikan atau penyempurnaan Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
7. Meningkatkan prosedur pelayanan kepada masyarakat lebih jelas dan transparan.
8. Meningkatkan aktivitas pengendalian dan melakukan pengawasan serta monitoring secara terus menerus terhadap semua kegiatan.

Halong, 01 Februari 2023



**CAMAT HALONG**

**RUSMIN NURIADIN, S.Ag., S.Sos., MH**  
**NIP. 19680321 199101 1 001**